

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN  
IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN  
DENGAN PASAL 266 KUHP ( Studi Kasus Putusan Nomor  
61/Pid.B/2018/PN.JMR )**

**Jelita Puspita Wiyana**

**Abstrak**

Salah satu bentuk kejahatan pemalsuan di Indonesia adalah pemalsuan identitas. Identitas adalah merupakan suatu ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang dibuktikan dalam surat berupa akta otentik. Dalam kehidupan bernegara memiliki identitas sangatlah penting, karena tanpa identitas akan sulit untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap hubungan yang timbul ataupun dihilangkan dalam suatu kepentingan kehidupan bernegara. Di dalam penulisan ini pemalsuan identitas yang dimaksud adalah dalam urusan perkawinan sesama jenis. Sebagaimana telah diketahui menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah perikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pergeserannya terhadap nilai-nilai dalam masyarakat kemungkinan lain yang terjadi adalah peristiwa perkawinan yang menyimpang ataupun bersifat melawan hukum seperti perkawinan sesama jenis. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan di hubungkan dengan pasal 266 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR) dan kedudukan *transgender* di Indonesia karena maraknya kaum pencinta sesama jenis dimasa kini.

Kata Kunci ; Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Surat, Kedudukan Transgender.

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE IMPLEMENTATION  
OF SELF-IDENTITIES IN MARRIAGE CONNECTED TO  
ARTICLE 266 KUHP (Case Study of Decision Number 61 / Pid.B  
/ 2018 / PN.JMR)**

**Jelita Puspita Wiyana**

**Abstract**

*One form of fraud in Indonesia is identity forgery. Identity is a characteristic, sign, or identity that is attached to someone who is proven in a letter in the form of an authentic deed. In the life of the state having an identity is very important, because without identity it would be difficult to get protection and legal certainty in every relationship that arises or is eliminated in an interest in the life of the state. In this writing the falsification of identity in question is in same-sex marriage. As already known according to Law No. 1 of 1974, marriage is an inner bond between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. But along with the times and the shift towards values in society, another possibility is the occurrence of a marriage that is deviant or against the law such as same-sex marriage. In this thesis the author concludes about how the criminal responsibility of criminal offenders of identity fraud in marriage is linked to article 266 of the Criminal Code (Case Study of Decision Number 61 / Pid.B / 2018 / PN.JMR) and the position of transgender in Indonesia due to the rise of same-sex lovers in the present.*

*Keywords ; Criminal Responsibility, Letter Forgery, Transgender Position.*